

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ormas dan Fenomena Dualisme di Jawa Barat

Muhamad Fahriansyah¹, Muhammad Deska Syawal², Puteri Dwijanti³, Rahman Fauzi⁴

¹²³⁴Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung Indonesia

mfahriansyah@gmail.com¹, mdeskasyawal2@gmail.com², puteriannisadwijanti@gmail.com³, rf915177@gmail.com⁴

Keywords:

Community Organization
Empowerment
Community Organization
Dualism
Public Policy
Community Participation
Community Organization
Regulations

Abstract: This research analyzes the implementation of community organization (Ormas) empowerment policies in West Java, focusing on the prevalent phenomenon of Ormas dualism. Employing a qualitative descriptive approach with a literature review method, the study analyzes secondary data from various sources, including literature, regulations, and government reports. The findings reveal that Ormas dualism is triggered by ideological differences, internal conflicts, and legal issues, resulting in a loss of organizational focus, overlapping programs, and ambiguity in partnerships with the government. Existing empowerment programs are deemed ineffective due to their generalized and less participatory approach. This research recommends the socialization of regulations, simplification of the Ormas registration process, strengthening of the verification and supervision system, and the development of more contextualized programs based on the needs of Ormas. This study contributes to a better understanding of Ormas empowerment and the implications of dualism on the effectiveness of public policy in West Java.

Kata Kunci:

Pemberdayaan Ormas
Dualisme Ormas
Kebijakan Publik
Partisipasi Masyarakat
Regulasi Ormas

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Jawa Barat, dengan fokus pada fenomena dualisme Ormas yang cukup dominan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, menganalisis data sekunder dari berbagai sumber seperti literatur, regulasi, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan dualisme Ormas dipicu oleh perbedaan ideologis, konflik internal, dan permasalahan legalitas, berdampak pada hilangnya fokus organisasi, tumpang tindih program, dan ambiguitas dalam kemitraan dengan pemerintah. Program pemberdayaan yang ada dinilai kurang efektif karena pendekatannya yang generalis dan kurang partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi regulasi, penyederhanaan proses pendaftaran Ormas, penguatan sistem verifikasi dan pengawasan, serta pengembangan program yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan Ormas. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pemberdayaan Ormas dan implikasi dualisme terhadap efektivitas kebijakan publik di Jawa Barat.

Pendahuluan

Di era demokratisasi dan otonomi daerah seperti saat ini, partisipasi masyarakat tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, tetapi menjadi komponen vital dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran masyarakat sebagai subjek pembangunan menuntut adanya ruang yang luas bagi peran serta berbagai elemen sipil, salah satunya adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi, menyelenggarakan kegiatan sosial, serta ikut berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

Di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta memiliki kompleksitas sosial budaya yang tinggi, Ormas berkembang dalam berbagai bentuk dan orientasi. Ada Ormas keagamaan, kepemudaan, lingkungan, hingga organisasi adat dan kemasyarakatan lokal. Keberagaman ini mencerminkan semangat kolektif masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai sosial, keadilan, dan pembangunan berbasis komunitas. Potensi besar ini seharusnya menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran strategi Ormas belum sepenuhnya dimaksimalkan. Banyak Ormas yang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, banyak Ormas yang menghadapi kendala dalam hal manajemen organisasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya kemampuan teknis dalam mengakses program pemerintah. Sementara secara eksternal, Ormas sering kali tidak mendapatkan partisipasi ruang yang setara, kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, dan tidak jarang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menjalankan sejumlah program pemberdayaan Ormas. Program tersebut meliputi pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan hibah, hingga pelatihan melalui forum-forum komunikasi. Tujuannya tidak lain

adalah agar Ormas dapat menjadi mitra pembangunan yang efektif. Namun, efektivitas program-program ini patut dipertanyakan. Banyak program yang berjalan tidak terkoordinasi, bersifat seremonial, atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil Ormas di lapangan. Belum adanya peta potensi Ormas yang komprehensif juga menyebabkan kebijakan sering tidak tepat sasaran.

Masalah ini menjadi semakin krusial karena di sisi lain, masyarakat semakin membutuhkan keberadaan Ormas yang tangguh dan responsif, khususnya dalam menjawab isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan Ormas dilakukan, dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan peran strategi Ormas di tengah masyarakat Jawa Barat.

Pemberdayaan merupakan konsep penting dalam ilmu pembangunan yang mengacu pada upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu menentukan nasib dan masa depannya secara mandiri. Dalam konteks Ormas, pemberdayaan berarti memperkuat organisasi agar memiliki daya tahan, daya saing, dan daya ubah (transformasi) dalam struktur sosial yang lebih luas. Fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan Ormas di Jawa Barat masih jauh dari harapan. Program-program yang ada cenderung bersifat generalis, tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan khusus dari masing-masing Ormas. Sebagian besar program masih menempatkan Ormas sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai mitra yang terlibat aktif dalam penyusunan dan evaluasi program.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan alur koordinasi antarinstansi pemerintah menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan program. Hal ini diperparah dengan kurangnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang jelas. Dampaknya, banyak Ormas yang merasa program-program tersebut hanya formalitas atau simbolik, tanpa memberikan dampak jangka panjang terhadap kapasitas dan keberlangsungan organisasi mereka. Ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan implementasi realitas inilah yang menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, penting

untuk melakukan kajian mendalam guna memahami akar permasalahan yang menghambat efektivitas pemberdayaan Ormas di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah Ormas yang sangat besar dan beragam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan organisasi masyarakat (Ormas) di Jawa Barat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan, sesuai karakteristik sosial budaya masyarakat Jawa Barat. Fokus penelitian mencakup pemetaan implementasi kebijakan yang telah berjalan, pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala yang dihadapi, dan akhirnya menghasilkan saran kebijakan yang terarah dan berkelanjutan untuk pemberdayaan Ormas di Jawa Barat.

Penelitian ini akan menyelidiki implementasi kebijakan pemberdayaan Ormas di Jawa Barat dengan menanyakan bagaimana pemerintah daerah melaksanakannya, kendala dan hambatan apa yang dihadapi, serta tanggapan dan persepsi Ormas terhadap program yang diterima. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan Ormas di tingkat lokal dan merumuskan kebijakan strategis untuk pemberdayaan Ormas yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan Ormas di Jawa Barat.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, administrasi publik, serta studi sipil. Dengan memahami dinamika pemberdayaan Ormas di tingkat daerah, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara negara dan sipil masyarakat dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mendalami topik tata kelola organisasi, kebijakan masyarakat partisipatif, dan pembangunan berbasis komunitas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah daerah,

khususnya dinas terkait yang menangani pembinaan dan pemberdayaan Ormas. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, agar lebih adaptif terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan riil Ormas. Selain itu, bagi Ormas sendiri, temuan dari penelitian ini dapat menjadi cermin untuk melakukan refleksi organisasi, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan daya tawar dalam membunuh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi wacana ilmiah, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi untuk mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan partisipatif melalui pemberdayaan Ormas sebagai pilar penting masyarakat sipil.

Tinjauan Literatur

Disini peneliti mengambil beberapa jurnal terdahulu yang relevan untuk menjadi bahan penelitian. Maka, peneliti dapat menganalisa jurnal yang dikemukakan oleh Kurniawan, Fakhry Hafiyyan Santoso, Budi Sobandi, Ade Maulana, Mahbub Afini Fitriana, Gina Dwi dengan judul Implementasi Asset Based Community Development: Strategi Peran Pemimpin dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis Circular Economic pada Unit Usaha Syariah bahwasannya implementasi strategi Asset Based Community Development (ABCD) dan ekonomi sirkular untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok pemuda dan pengusaha skala kecil, di Sukabumi. Dokumen ini menyoroti bagaimana pemanfaatan aset lokal, sumber daya alam, dan upaya kolaboratif dapat meningkatkan kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti perikanan dan pemasaran digital, dengan fokus pada prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat, inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi tantangan seperti akses pasar, isu iklim, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kemandirian ekonomi dan ketahanan lingkungan.

Lalu, dalam jurnal yang dikemukakan oleh Serly Wulandari, Saadah Oktaviani, Mubarak R. Adam dengan judul pemberdayaan masyarakat berbasis skill development centre (sdc) dalam meningkatkan kewirausahaan di kabupaten bandung barat provinsi jawa barat yang mana dalam jurnalnya membahas mengenai pentingnya mengembangkan program Skill Development Centre (SDC) di Kabupaten Bandung Barat

yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan kewirausahaan, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Program-program tersebut mengikuti pendekatan terstruktur yang melibatkan tahapan-tahapan penyadaran, pemberdayaan, dan pemberdayaan, dengan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan kemitraan. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pendapatan masyarakat, kewirausahaan, dan kemandirian, meskipun tantangan seperti keterbatasan dana, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat masih ada. Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan kapasitas masyarakat.

Selain itu, dalam jurnal yang dikemukakan oleh Endang Hermawan, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Futri Safitri & Galih Tri Laksono mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tirtawangunan kecamatan sindangagung kabupaten kuningan provinsi jawa barat yang mana dalam jurnalnya menguraikan upaya Pemerintah Desa Tirtawangunan di Kuningan, Jawa Barat, untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, pertanian, pendidikan, teknologi, dan pengembangan pemuda. Inisiatif ini mencakup layanan kesehatan seperti Posyandu, kegiatan ekonomi seperti pelatihan membatik, kompetisi pertanian, dan pembentukan organisasi pemuda, didukung oleh akses internet untuk pembelajaran daring selama pandemi. Program-program tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan partisipasi dan keterbatasan waktu terkait pandemi, dengan pendanaan terutama dari anggaran desa (APBDes) dan kolaborasi dengan sektor swasta. Secara keseluruhan, pemerintah desa secara aktif menyusun strategi dan berkolaborasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meskipun masih ada kendala dalam keterlibatan masyarakat dan pengelolaan sumber daya.

Pemberdayaan

Kartasmita (1996) menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama: menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang,

memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, serta melindungi mereka dari ketimpangan atau struktural. Konsep ini sejalan dengan peran Ormas sebagai aktor non-negara yang bekerja mendampingi masyarakat akar rumput.

Lebih lanjut, Wahid (2011) menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting dalam konteks pemberdayaan. Tanpa adanya ruang dialog dan partisipasi yang setara, program pemberdayaan cenderung bersifat top-down, dan gagal memenuhi kebutuhan aktual di lapangan. Dalam konteks ini, Ormas bukan sekedar objek yang diberdayakan, melainkan harus dipandang sebagai subjek pembangunan.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan Ormas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan berbasis kebutuhan (need- based approach), mendorong partisipasi yang sejati, dan menyediakan dukungan berkelanjutan (Suryono, 2018). Lestari (2020) menambahkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pemberdayaan program menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Ormas dan pemerintah.

Organisasi Masyarakat

konsep Ormas dan LSM berdasarkan Holloway (1997) yang mendefinisikannya sebagai organisasi nirlaba yang secara mandiri melayani kepentingan masyarakat. Holloway (1997) juga menjelaskan masyarakat sipil sebagai gerakan sosial terorganisir yang melibatkan beragam individu dengan kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Fowler (1997) membedakan Ormas dan LSM (NGOs): Ormas merupakan organisasi sukarela yang terdaftar, taat hukum, dan bertanggung jawab secara sosial; sementara LSM berfokus pada advokasi dan bantuan bagi masyarakat lemah, seringkali dengan pendanaan parsial dari pemerintah dan sektor swasta. Mengutip Mouzelis (dalam Halili, 2006), Ormas/LSM berperan penting dalam masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintah dan memastikan penegakan hukum yang efektif, menciptakan keseimbangan kepentingan, dan mencegah dominasi satu pihak. Penelitian ini menggunakan

pendekatan normatif dan kritis untuk memahami peran Ormas dan LSM sebagai kekuatan pembangunan di Indonesia.(Iskandar, 2017)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena implementasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih agar peneliti dapat mengkaji secara mendalam berbagai kebijakan, strategi, tantangan, dan hasil dari upaya pemberdayaan Ormas berdasarkan sumber-sumber literatur yang tersedia.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi pemerintah, dan dokumen terkait lainnya.

Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi tertentu secara fisik karena bersifat studi pustaka. Namun, kajian difokuskan pada implementasi pemberdayaan Ormas di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Mei hingga Juli 2025, yang mencakup tahapan penelusuran literatur, analisis data, dan penulisan laporan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi terhadap berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Sumber data mencakup:

1. Buku-buku ilmiah yang membahas teori pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kebijakan publik.
2. Artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik pemberdayaan Ormas.
3. Dokumen peraturan pemerintah daerah, seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat, Peraturan Daerah tentang Ormas, dan laporan tahunan Dinas Kesbangpol.

4. Website resmi instansi pemerintah dan media terpercaya yang memuat data statistik dan informasi aktual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji dipilih secara selektif berdasarkan keterkaitan, kredibilitas, dan aktualitasnya. Pengumpulan dilakukan dengan menelusuri perpustakaan fisik, jurnal daring (online), serta dokumen resmi dari lembaga pemerintahan dan organisasi yang kredibel.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan isi dari sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data, yaitu memilah informasi penting dari berbagai sumber yang relevan.
2. Klasifikasi dan interpretasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema atau topik utama seperti kebijakan, strategi pelaksanaan, dan hambatan pemberdayaan Ormas.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan-temuan utama berdasarkan hasil analisis dan menyusunnya secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan evaluasi kritis sumber dengan cara memeriksa otoritas penulis, kredibilitas penerbit, tahun terbit, dan relevansi isi terhadap topik. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber pustaka, yaitu membandingkan data dari beberapa literatur yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh.

Hasil Penelitian

1. Keberadaan Dualisme dalam Organisasi Masyarakat di Jawa Barat

Hasil penelitian mengungkap bahwa fenomena dualisme organisasi masyarakat (ormas) cukup dominan terjadi di Jawa Barat. Dualisme ini merujuk pada munculnya dua atau lebih organisasi yang berasal dari satu kelompok sosial, namun berkembang menjadi entitas berbeda baik secara struktural maupun administratif. Beberapa ormas terpecah karena perbedaan pandangan ideologis, konflik personal antar pendiri atau pengurus, serta ketidaksepakatan terhadap arah gerakan organisasi. Dualisme juga dipicu oleh

persoalan legalitas, di mana satu pihak memiliki badan hukum resmi (akta notaris dan pengesahan Kemenkumham), sementara yang lain hanya memiliki SKT dari Kementerian Dalam Negeri, atau bahkan belum diverifikasi sama sekali.

Situasi ini menimbulkan persoalan dalam hal identifikasi legalitas oleh masyarakat maupun pemerintah, menyebabkan ketidakteraturan dan kebingungan mengenai siapa yang sah mewakili komunitas tertentu. Dualisme seringkali menyebabkan ketegangan sosial di tingkat lokal karena keduanya mengklaim legitimasi yang sama atas komunitas yang dilayani. Permasalahan legalitas semakin memperumit situasi. Seringkali, satu Ormas memiliki legalitas resmi (akta notaris dan pengesahan Kemenkumham), sementara yang lain hanya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, atau bahkan sama sekali belum terverifikasi. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Ketidakjelasan legalitas tersebut berdampak pada kesulitan identifikasi Ormas yang sah mewakili komunitas tertentu. Masyarakat dan pemerintah menjadi kebingungan menentukan Ormas mana yang berwenang untuk mewakili kepentingan kelompok sosial yang bersangkutan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan tumpang tindih program.

Lebih jauh, dualisme Ormas seringkali memicu ketegangan sosial di tingkat lokal. Kedua Ormas yang bersaing seringkali mengklaim legitimasi yang sama atas komunitas yang dilayani, menimbulkan persaingan dan perebutan sumber daya, serta potensi konflik horizontal. Maka, fenomena dualisme Ormas di Jawa Barat memerlukan perhatian serius. Ketidakjelasan legalitas dan persaingan antar Ormas berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menghambat efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Solusi komprehensif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Ormas yang sehat dan berkelanjutan.

2. Implikasi Dualisme terhadap Fungsi dan Stabilitas Ormas

Dampak dari dualisme sangat signifikan terhadap fungsi ormas sebagai elemen masyarakat sipil. Organisasi yang mengalami dualisme kehilangan fokus dan kohesivitas internal. Mereka gagal menjalankan peran-peran dasar seperti advokasi sosial,

pendidikan politik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam banyak kasus, program-program ormas menjadi tumpang tindih, bahkan saling bertentangan.

Dari sisi hubungan dengan pemerintah, dualisme menciptakan ambiguitas dalam menjalin kemitraan. Pemerintah daerah kesulitan menentukan ormas mana yang layak diajak kerja sama, terutama dalam kegiatan strategis seperti pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan fasilitasi bantuan sosial. Hal ini secara tidak langsung melemahkan efektivitas kebijakan kolaboratif yang dirancang oleh pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat.

Dualisme Ormas di Jawa Barat memiliki dampak signifikan terhadap fungsi mereka sebagai elemen masyarakat sipil. Perpecahan internal yang terjadi mengakibatkan hilangnya fokus dan kohesivitas organisasi. Akibatnya, Ormas yang terpecah kesulitan menjalankan peran-peran utamanya, seperti advokasi sosial, pendidikan politik, dan pemberdayaan masyarakat. Kehilangan fokus dan kohesivitas ini berdampak pada tumpang tindih dan bahkan pertentangan program-program yang dijalankan oleh masing-masing fraksi Ormas. Sumber daya yang seharusnya terfokus pada satu tujuan menjadi terbagi dan terbuang sia-sia, mengurangi efektivitas kerja dan dampak positif bagi masyarakat. Program-program yang saling bertentangan justru dapat menimbulkan kebingungan dan kontraproduktif.

Dualisme juga menciptakan ambiguitas dalam hubungan Ormas dengan pemerintah daerah. Pemerintah kesulitan menentukan Ormas mana yang representatif dan layak diajak bermitra dalam program-program strategis. Ketidakpastian ini menghambat pelaksanaan program kolaboratif yang dirancang pemerintah bersama masyarakat. Keraguan pemerintah dalam memilih mitra kerja sama berdampak pada melemahnya efektivitas kebijakan kolaboratif. Program-program yang dirancang untuk pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan fasilitasi bantuan sosial menjadi kurang efektif karena terhambat oleh ketidakjelasan representasi Ormas di lapangan.

Secara keseluruhan, dualisme Ormas tidak hanya melemahkan organisasi itu sendiri, tetapi juga menghambat efektivitas kerja sama pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini membutuhkan solusi sistematis untuk memperkuat kapasitas Ormas,

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan mekanisme yang jelas dalam menentukan representasi Ormas di tingkat lokal.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Menyikapi Dualisme

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah menjalankan sejumlah program fasilitatif. Beberapa kegiatan seperti Diskusi Forum Ormas Jawa Barat, Ormas Day, hingga Jambore Ormas diselenggarakan untuk mendorong komunikasi lintas organisasi dan menyatukan kembali semangat kolaborasi antarormas.

Forum-forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi, tetapi juga sebagai ruang identifikasi masalah struktural dan ideologis yang dihadapi ormas. Pemerintah mendorong proses media. Selain diskusi, Bakesbangpol juga menyelenggarakan Ormas Day dan Jambore Ormas. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar Ormas. Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan semangat kolaborasi dan kerja sama antar Ormas dapat dihidupkan kembali. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi dan silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana identifikasi masalah. Forum-forum yang diselenggarakan memberikan kesempatan bagi Ormas untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan secara terbuka permasalahan struktural dan ideologis yang mereka hadapi. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan, pemerintah berharap dapat merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Program-program fasilitatif yang ditawarkan Bakesbangpol bertujuan untuk mendorong proses penyelesaian konflik internal dan rekonsiliasi antar Ormas, sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Ormas yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Barat.

4. Kelembagaan dan Regulasi sebagai Instrumen Pencegahan

Regulasi formal, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaannya, memegang peran krusial dalam upaya meredam fenomena dualisme Ormas. Regulasi ini secara jelas mengatur tahapan pendaftaran Ormas,

persyaratan legalitas yang harus dipenuhi, serta peran dan tanggung jawab Ormas dalam kehidupan bermasyarakat. UU Nomor 17 Tahun 2013 dan PP Nomor 58 Tahun 2016 menegaskan bahwa hanya Ormas yang berbadan hukum atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) resmi yang berhak menjalankan aktivitas kemasyarakatan secara legal. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan Ormas serta mencegah potensi konflik yang ditimbulkan oleh keberadaan Ormas yang tidak terdaftar.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak Ormas yang beroperasi tanpa memenuhi standar legalitas yang telah ditetapkan. Keberadaan Ormas-Ormas yang tidak terdaftar atau belum memenuhi persyaratan legalitas ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya dualisme. Mereka beroperasi secara paralel dengan Ormas yang telah terdaftar, menimbulkan kebingungan dan potensi konflik. Untuk mengatasi permasalahan ini, sosialisasi intensif terhadap regulasi yang berlaku menjadi langkah penting. Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pengurus dan calon pengurus Ormas, agar mereka memahami dan menaati ketentuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan kepatuhan dan mencegah pendirian Ormas baru yang duplikatif.

Selain sosialisasi, penyederhanaan proses pendaftaran Ormas juga perlu dilakukan. Proses pendaftaran yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menjadi penghambat bagi Ormas untuk memenuhi persyaratan legalitas. Dengan menyederhanakan proses pendaftaran, pemerintah dapat mendorong lebih banyak Ormas untuk mendaftarkan diri dan memenuhi standar legalitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengurangi potensi dualisme.

5. Tantangan dalam Verifikasi dan Pengawasan Ormas

Berdasarkan data Bakesbangpol Jawa Barat per Mei 2024, terdapat 1.562 ormas yang terdaftar, di mana hanya 736 yang aktif, 541 tidak aktif, dan 285 belum diverifikasi. Selain itu, 829 ormas belum tervalidasi dan hanya 463 yang berbadan hukum. Fakta ini menunjukkan masih lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan ormas. Dalam kondisi

seperti ini, potensi terjadinya dualisme sangat tinggi karena minimnya kontrol terhadap pembentukan dan kegiatan ormas baru.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional warga negara. Namun di sisi lain, negara juga berkepentingan menjaga stabilitas sosial-politik dan efektivitas organisasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem informasi ormas, menerapkan validasi berkala, dan mendorong ormas untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan dominansi dualisme Ormas di Jawa Barat, yang dipicu oleh perbedaan ideologis, konflik internal, dan persoalan legalitas. Temuan ini selaras dengan teori pemberdayaan Kartasmita (1996) yang menekankan pentingnya menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan masyarakat, memperkuat potensi internal, dan melindungi dari ketimpangan struktural. Namun, implementasi kebijakan pemberdayaan di Jawa Barat, sebagaimana dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya (misalnya, Suryono, 2018; Lestari, 2020), belum sepenuhnya berhasil menciptakan suasana tersebut. Program-program yang cenderung generalis dan kurang memperhatikan konteks lokal, seperti yang dikritik dalam studi tentang pemberdayaan masyarakat di Kuningan (Hermawan et al., 2021), berkontribusi pada inefektivitas pemberdayaan Ormas. Dualisme Ormas juga menghambat sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang diutarakan Wahid (2011), mengakibatkan program yang bersifat top-down dan gagal memenuhi kebutuhan riil di lapangan. Penelitian tentang implementasi Asset Based Community Development (ABCD) di Sukabumi (Kurniawan et al.) dan pemberdayaan berbasis Skill Development Centre (SDC) di Bandung Barat (Wulandari et al.) menunjukkan pentingnya pendekatan yang partisipatif dan berbasis aset lokal, yang kontras dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan kurangnya partisipasi Ormas dalam perencanaan dan evaluasi program.

Implikasi dari dualisme Ormas sangat signifikan. Kehilangan fokus dan kohesivitas internal (seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian) menghambat peran Ormas

dalam advokasi sosial, pendidikan politik, dan pemberdayaan masyarakat. Ambiguitas dalam kemitraan dengan pemerintah, sebagaimana diidentifikasi dalam hasil penelitian, melemahkan efektivitas kebijakan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan temuan Iskandar (2017) yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja Ormas yang efektif. Upaya pemerintah Jawa Barat melalui Bakesbangpol, meskipun berupaya fasilitatif, belum sepenuhnya efektif mengatasi akar permasalahan dualisme. Meskipun program-program seperti Diskusi Forum Ormas dan Ormas Day bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, keberhasilannya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Penelitian ini tidak melibatkan data primer dari wawancara langsung dengan Ormas atau pejabat pemerintah, sehingga pemahaman terhadap perspektif dan pengalaman mereka masih terbatas. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga perlu meneliti lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi Ormas dalam program pemerintah, serta strategi yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Ormas. Analisis lebih mendalam terhadap regulasi yang ada, khususnya UU No. 17 Tahun 2013 dan PP No. 58 Tahun 2016, dan implementasinya di lapangan juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi yang lebih efektif.

Saran untuk penelitian lebih lanjut meliputi: (1) studi kasus mendalam di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menganalisis variasi implementasi kebijakan pemberdayaan Ormas; (2) penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak dualisme Ormas terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas program pemerintah; (3) evaluasi program pemberdayaan Ormas yang komprehensif dengan indikator kinerja yang jelas; dan (4) studi komparatif dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengatasi dualisme Ormas. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi awal dalam memahami kompleksitas dualisme Ormas di Jawa Barat dan menyoroti pentingnya pendekatan yang

holistik dan partisipatif dalam pemberdayaan Ormas untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap dominasi dualisme Ormas di Jawa Barat, yang disebabkan oleh perbedaan ideologis, konflik internal, dan masalah legalitas, mengakibatkan hilangnya fokus dan kohesivitas internal Ormas, serta ambiguitas dalam kemitraan dengan pemerintah. Selain itu, Temuan menunjukkan inefektivitas program pemberdayaan Ormas yang ada, yang cenderung generalis dan kurang partisipatif. Maka, Penelitian ini berkontribusi pada studi pemerintahan dan administrasi publik dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pemberdayaan Ormas, serta perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi intensif terhadap regulasi yang ada, penyederhanaan proses pendaftaran Ormas, penguatan sistem verifikasi dan pengawasan, serta pengembangan program pemberdayaan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan Ormas. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan campuran (mixed methods) dan studi kasus yang lebih mendalam di berbagai wilayah Jawa Barat sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Iskandar. (2017). Konspesi Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan Balanced Scorecard. *Nukhbatul 'Ulum*, 3(1), 324–341.
<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.27>
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Nurita Julianty, D., Safitri, F., & Tri Laksono, G. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191–198. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/619>
- Huaida, A., Herwina, W., & Karwati, L. (2024). *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat*

Melalui Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi (Studi pada Masyarakat di Desa Subang Kabupaten Kuningan Jawa Barat). 01, 1–5.

- Wahyudi, A., Rifa, A. B., & Sanusi, I. (2024). *Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui LPPM Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*. 9(November 2023), 19–38.
- Hasibuan, A. (2021). Strategi Manajemen Pemberdayaan Organisasi Sosial di Era Otonomi Daerah . *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 16(2), 177–191.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan* . Jakarta: Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* . Jakarta: CIDES.
- Lestari, R. (2020). "Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan Lokal". *Jurnal Partisipasi dan Pengabdian* , 7(1), 42–55.
- Nugroho, H. (2005). *Otonomi Daerah dan Penguatan Masyarakat Sipil* . Jakarta: LP3ES.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2022). *Dokumen Rencana Strategis Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020–2024* . Bandung: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Pranowo, Y. (2019). "Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ormas dalam Penanggulangan Kemiskinan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 23(1), 88–102.
- Suryono, D. (2018). "Evaluasi Program Pemberdayaan Ormas di Daerah: Studi Kasus di Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 18(2), 135–148.
- Wahid, A. (2011). *Ormas dan Demokrasi: Dinamika Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Pemerintahan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, E. (2017). "Penguatan Kapasitas Ormas Melalui Program Hibah dan Pelatihan". *Jurnal Kebijakan Publik* , 11(3), 203–219.